

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN
AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan
pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

FITRI UTHAMI SYAHRIANI

NIM: 10100113002

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN
AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan
pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

FITRI UTHAMI SYAHRIANI

NIM: 10100113002

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

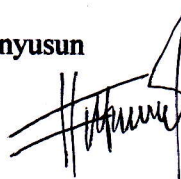
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FITRI UTHAMI SYAHRIANI
Nim : 10100113002
Tempat /Tgl. Lahir : Barru, 03 Maret 1995
Jurusan : Peradilan Agama
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Memutuskan
Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa
Kelas I B

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B” adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 31 Maret 2017

Penyusun



FITRI UTHAMI SYAHRIANI
Nim: 10100113002

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Fitri Uthami Syahrani, NIM: 10100113002, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul, "Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II ", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

Makassar, 24 Maret 2017 M
25 Jumadil Akhir 1438 H

Munaqisy I : Zulfahmi Alwi, M.Ag, Ph.D.

Munaqisy II : Abdi Wijaya, S.S, M.Ag.

Pembimbing I : Dr. H. Supardin, M.H.I.

Pembimbing II : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disetujui oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darrussalam, M.Ag.
NIP: 196210161990031003

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Peradilan



Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP: 196503021994031003

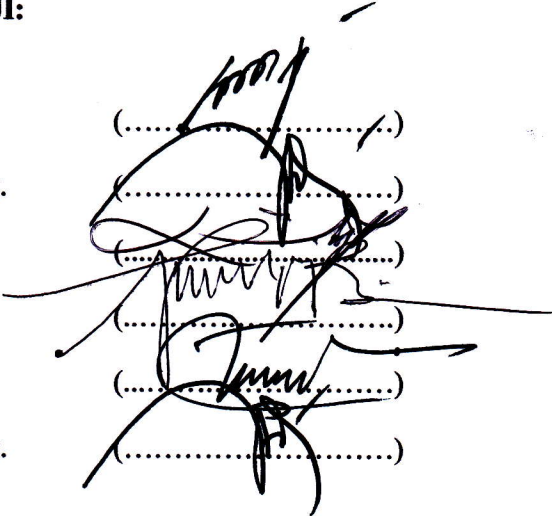
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B", yang disusun oleh Firi Uthami Syahriani, NIM: 10100113002, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peadilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 27 Maret 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), dalam ilmu Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 27 April 2017 M
30 Rajab 1438 H

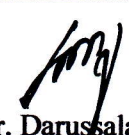
DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Zulfahmi Alwi, M.Ag, Ph. D.	(.....)
Munaqisy II	: Abdi Wijaya, S.S, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	(.....)



Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

Allah maha penyayang dan pengasih, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah serta rasa dan rasio pada-Mu Sang Khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi pengetahuan penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia hukum, khusus dalam ruang lingkup Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Dengan segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Alamsyah (alm.) dan Hj. Nasriah yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada para keluarga yang tak hentinya memberikan motivasi dan selalu menemani penulis dalam candanya. Kepada Dr. H. Supardin, M.H.I. dan Dr. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan

pembimbing I B, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: (1) Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2) Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, (3) Dr. H. Supardin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama, dan (4) Dr. Hj. Patimah, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Peradilan Agama, serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkup Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada ibu Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, Ibu Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, Bapak Drs. Ahmad Nur, M.H. serta seluruh pegawai kantor Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melaksanakan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada penyemangat setiaku Kakak Muhammad Sukri Ahmad, S.Pd., M. Pd., yang telah menemaniku dalam suka dan duka, sahabat-sahabat terhebatku Kanis, Jen, Naya, Ilo, dan Cia, Faqih, khaeril, serta seluruh rekan mahasiswa Jurusan Peradilan Agama angkatan 2013 atas segala kebersamaan, motivasi, saran, dan bantuannya kepada penulis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan tulisan ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi pribadi penulis. Amin.

Makassar, Maret 2017

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	11
B. Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim.....	14
C. Proses Penemuan Hukum oleh Hakim.....	19
D. Tinjauan Umum Asas Ultra Petitum Partium	25
E. Akibat Hukum	28
F. Tinjauan Umum Cerai Talak	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
A. Lokasi dan Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
E. Pengujian Keabsahan Data.....	
BAB IV HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Kedudukan Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap RBg	54
C. Alasan Hakim Menerapkan Hak <i>Ex Officio</i>	63
D. Akibat Hukum Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Implikasi Penelitian.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	śad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ...	<i>fathah dan alif</i> <i>atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Lafz al-Jalalah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

B. Daftar Singkatan.

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	= subhanahu wa ta ala
saw.	= sallallahu alaihi wa sallam
M	= Masehi
H	= Hijriah
QS	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
SEMA	= Surat Edaran Mahkamah Agung
KHI	= Kompilasi Hukum Islam

ABSTRAK

NAMA : FITRI UTHAMI SYAHRIANI
NIM : 10100113002
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA CERAI TALAK DI
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Skripsi ini membahas bagaimana Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II. Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa kelas I B seringkali menerapkan hak *ex officio* yang dimilikinya, *ex officio* merupakan suatu kewenangan yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk memberikan sesuatu yang tidak terdapat dalam gugatan padahal Hukum Acara Perdata yang diatur dalam pasal 189 (3) Rbg menegaskan bahwa seorang hakim tidak boleh memberikan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak maka dari itu perlu ditelusuri bahwa bagaimana dasar hukum *ex officio*, alasan hakim menerapkannya, serta akibat hukum dari penerapan hak *ex officio* tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yakni melihat atau memandang suatu hal dari legalitas hukumnya terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat Islam seperti Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Teknik pengumpulan datanya adalah *interview* dan Dokumentasi. *Interview* ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan hakim hakim yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas I B Kemudian *Dokumentasi* merupakan pengumpulan data dari dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan perceraian, seperti putusan pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dan lain sebagainya.

Setelah diadakan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa yang *pertama* dasar hukum hakim dalam menerapkan hak *ex officio* yaitu pasal 41 huruf c Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata secara umum yaitu pasal 189 (3) Rbg karena diantara keduanya berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu Undang Undang khusus mengenyampingkan Undang Undang yang umum. *Kedua* Alasan hakim menerapkan hak *ex officio* adalah memberikan hak yang semestinya diberikan kepada istri yang hendak diceraikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak yang dimilikinya *ketiga* akibat hukum dari penerapan hak *ex officio* adalah terwujudnya asas hukum yaitu asas keadilan dengan meletakkan semua pada porsinya. Dengan kata lain semua pihak melaksanakan kewajibannya dan diberikan apa yang telah menjadi haknya. Untuk para hakim agar senantiasa menjunjung tinggi nilai nilai keadilan dalam setiap putusannya dan untuk peneliti

selanjutnya diharapkan bisa meneliti lebih dalam terhadap asas *ultra petitum partium*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Menurut pasal 10 Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh empat lingkungan Peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing.

Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan pengertian peradilan itu, cakupan dan batasan Peradilan Agama meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan Negara lainnya dan dari pihak luar. Secara operasional kekuasaan itu terdiri atas kekuasaan absolut (*absolute competentie*) dan kekuasaan relatif (*relative competentie*)
2. Badan Peradilan Agama, sebagai satuan penyelenggara kekuasaan kehakiman ia meliputi hierarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam struktur organisasi peradilan.
3. Prosedur perkara di Pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural (hukum acara) dan produk-produknya (putusan dan penetapan).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Prosedur itu meliputi tahapan kegiatan menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang di ajukan ke pengadilan.

4. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syariah.
5. Orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara (berselisih dan bersengketa), atau para pencari keadilan.
6. Hukum Islam, sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam proses peradilan.
7. Penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.¹

Berdasarkan komponen-komponen di atas warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mencari keadilan untuk menyelesaikan masalah perceraian di Pengadilan Agama, karena masalah perceraian merupakan salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama.

Undang – Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dalam pasal 38 menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.² Kematian merupakan penyebab putusnya perkawinan yang tidak bersifat kausalitas. Kedua hal terakhir ini bisa berupa talak (cerai talak) atau *khuluk* (cerai gugat), yang masing-masing memiliki sebab atau alasan terjadinya. Putusnya perkawinan lantaran cerai talak adalah bila kehendak cerai itu datang dari pihak suami (pihak suami yang mengajukan permohonan cerai) sedangkan bila gugatan itu datangnya dari istri maka perceraian itu disebut cerai gugat (*khuluk*).³

¹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 36.

²Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-sunnah*, (Cet. II; Jakarta: Akademika Presindo, 2002), h. 276.

Dengan putusnya ikatan perkawinan, maka hak-hak antara suami dan istri masih ada, meski tidak sebesar dengan ketika masih dalam ikatan perkawinan, khususnya berkenaan dengan hak-hak istri sebagai perempuan yang di talak, baik hak atas diri maupun hak atas harta dan anaknya.

Hak merupakan sesuatu yang menjadi bagian seseorang dari orang lain, dan kewajiban sebagai pemenuhan atas hak orang lain darinya. Antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan selalu berkaitan.

Namun ketika dalam perkara perceraian karena talak yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa, pada umumnya tuntutan yang diminta oleh penggugat atau pemohon hanya berisi “menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon, dan membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tanpa disertai dengan tuntutan pemberian hak kepada istri.”⁴

Hak yang dimaksud di sini adalah hak yang berupa nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* serta nafkah untuk anak. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diberikan ke mantan istri selama ia menunggu *iddah*nya selesai. *Iddah* bermakna perhitungan atau sesuatu yang di hitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari suci bagi wanita untuk melakukan perkawinan. Sedangkan secara istilah, *iddah* mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.⁵ Nafkah *mut'ah* adalah sesuatu yang wajib diberikan kepada istri apabila

⁴Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 4 April 2016.

⁵Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2004), h. 240.

suami hendak menceraikannya, nafkah *mut'ah* sering disebut sebagai hadiah suami kepada istri yang hendak diceraikannya dan hadiah tersebut dapat berupa sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kemampuan suami.

Jika istri tidak mengajukan tuntutan akan hak-hak yang dimilikinya secara otomatis dengan berdasarkan atas pasal 189 RBg, hak yang dimiliki oleh istri akan hilang karena dalam Hukum Acara Perdata hakim tidak dapat memberikan hak-hak yang dimiliki istri jika tidak ada tuntutan dari istri akan hak-haknya bila terjadi perceraian.

Hal ini karena dalam Hukum Acara Perdata, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan kepada sepenuhnya yang berkepentingan. Jadi atau tidaknya suatu perkara atau apakah akan diproses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan di ajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Pengadilan atau dalam hal ini adalah hakim tidak dapat melakukan tindakan permulaan atau memaksa supaya orang perorangan yang merasa haknya dilanggar, bertindak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu ke muka Pengadilan.

Dengan demikian jelas, bahwa di sini tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim hanya bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang di ajukan kepadanya.

Selain itu dalam pemberian putusan terhadap suatu perkara perdata, hakim wajib mengadili segala bagian dari tuntutan penggugat ia tidak boleh memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang dituntut.⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat 3 RBg bahwa seorang

⁶Nur Rasyaid, *Hukum Acara Perdata*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 4.

hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat.⁷

Jika dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, termohon tidak mengajukan gugat rekonvensi mengenai hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan suaminya. Maka berdasarkan asas “*ultra petitum partium*”, hakim tidak dapat memberikan hak-hak istri tersebut akibat cerai talak yang merupakan kewajiban suami, dalam amar putusan.⁸

Jabatan hakim merupakan jabatan fungsional karena hakim memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak tertentu. Salah satu yang dimiliki hakim adalah hak *ex officio* yang berarti karena jabatan.⁹

Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan wewenang seorang hakim dalam memutuskan perkara.¹⁰

Pada kenyataannya di Pengadilan Agama Sungguminasa hakim menerapkan hak *ex officio* nya dalam memutuskan perkara cerai talak. Sehingga dapat diartikan bahwa hakim Pengadilan Agama Sungguminasa menyimpang dari pasal 189 ayat (3) RBg dan pasal 178 ayat (3) HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim tidak boleh memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut.

Dengan hakim menerapkan hak *ex officio* nya dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B maka peneliti merasa

⁷Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005), h. 58.

⁸Fauzan, Edy Noerfuady, *Problematika Hak Ex officio Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian* (Jakarta: Al hikmah & Ditbinbapeda Islam, 1997), h. 89.

⁹J.C.T. SI Brangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 46.

¹⁰Ahmad Nur, *Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*, 4 april 2016.

tertarik untuk mengkaji bagaimana hak *ex officio* diterapkan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim diterapkan dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B? dan submasalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan dasar hukum hak *ex officio* hakim terhadap RBg?
2. Bagaimanakah alasan hakim menerapkan hak *ex officio* dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari penerapan hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman maka peneliti memberikan defenisi mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni **“Penerapan Hak *ex officio* Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B”**

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.¹¹
2. Hak *ex officio* adalah kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, kewenangan ini

¹¹Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 1448.

sepenuhnya merupakan wewenang seorang hakim dalam memutuskan perkara¹²

3. Hakim atau *qadi* artinya memutus, menurut bahasa hakim adalah orang yang mengadili perkara di Pengadilan atau Mahkamah.¹³
4. Perkara adalah masalah, persoalan, atau urusan yang perlu di selesaikan atau dibereskan.¹⁴
5. Cerai talak terdiri dari 2 kata, cerai dan talak. Cerai ialah terputusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri.¹⁵ Sedangkan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama.¹⁶ Dengan demikian cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dan istrinya, dengan talak yang di ucapkan suami di depan Pengadilan Agama.¹⁷
6. Pengadilan Agama Sungguminasa adalah salah satu lembaga peradilan agama Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang RI No 14 Tahun 1970 Pasal 10 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor : 34/1972 tanggal 16 maret 1972.

Berdasarkan deskripsi fokus dapat di simpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada pelaksanaan hak atau wewenang khusus yang di berikan kepada

¹²Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 4 April 2016.

¹³Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, h. 475.

¹⁴Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, h. 1059.

¹⁵ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷Arhum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 17.

hakim karena jabatannya dalam memutuskan perkara cerai talak yang tidak ada tuntutan guna memberikan hak hak yang di miliki para pihak yang berperkara dan demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

D. *Kajian Pustaka*

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak diantaranya:

A. Mukti Arto dalam *praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama*¹⁸ menjelaskan bahwa hakim wajib mengadili petitum yang di ajukan. Hakim tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Lebih jelas lagi di bahas bahwa dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, berdasarkan pasal 41 huruf c Undang- Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

R. Soeroso dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Lengkap dan praktis HIR, RBg, Dan Yurisprudensi*¹⁹ mengungkapkan bahwa dalam keputusan MA Reg. No.: 556 K/Sip/1971 tgl. 8 januari 1972 mengabulkan lebih daripada yang digugat adalah di Bzinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil. Juga pada keputusan MA Tgl. 10-11-1971 No. 556 K/Sip/1971. Hubungan antara putusan dengan gugatan yaitu peradilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materil.

¹⁸A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 13.

¹⁹Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 134.

Sarwono dalam *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*²⁰ menjelaskan bahwa isi putusan hakim di atur dalam HIR pasal 178 ayat (2) yaitu hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan. dan pada pasal (3) lebih jelas dikatakan bahwa ia tidak di izinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak di gugat atau memberikan lebih daripada yang di gugat.

Darahim dalam skripsi yang berjudul *Problematika Penerapan hak ex Officio Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Soppeng (suatu pendekatan hukum Islam)* pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²¹, jenis penelitiannya adalah kualitatif dan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan *library research* dan *field research* pada skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Islam menanggapi hak *ex officio* agar putusan yang ditetapkan oleh hakim dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak serta membahas tentang pemecahan masalah-masalah yang timbul akibat dari hak *ex officio* hakim dan pengaruhnya terhadap masyarakat dengan perubahan sosial yang begitu cepat.

Ada Perbedaan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis. Skripsi yang dilakukan oleh Darahim lebih fokus kepada pandangan Islam terhadap hak *ex officio* Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada penerapan *ex officio* cerai talak saja dan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu melihat legalitas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak *ex officio*.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

²⁰Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 232.

²¹Darahim, *Promblematika Peerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Watan Soppeng (Suatu Pendekatan Hukum Islam)*, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2001).

1. Mengetahui kedudukan dasar hukum hak *ex officio* hakim terhadap RBg
2. Mengetahui alasan hakim menerapkan hak *ex officio* dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.
3. Mengetahui akibat hukum dari penerapan hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum Acara perdata dalam lingkungan Pengadilan Agama, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis agar dapat memahami lebih mendalam mengenai hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.
- b. Sebagai bahan informasi dan bahan masukan bagi praktisi dan pemerhati hukum Islam dalam kapasitasnya sebagai pegawai dalam lingkup Peradilan Agama terkhusus kepada hakim Pengadilan Agama agar senantiasa memberikan rasa keadilan terhadap orang-orang yang berperkara.
- c. Diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat Sungguminasa tentang hak *ex officio* hakim.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Ex Officio Hakim

1. Pengertian Hak Ex Officio Hakim

Pengertian hak *ex officio* hakim menurut Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum *ex officio* berarti karena jabatan, hal ini dapat dilihat dari contoh dalam hal adanya eksepsi yang di benarkan secara hukum hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang.¹

Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *ex officio* berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*.²

Menurut Subekti pengertian hak *ex officio* berasal dari bahasa latin, *ambstholve* bahasa belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.³ Hakim atau *qadi* yang artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang-orang yang bijaksana atau orang yang memutus perkara dan menetapkan.⁴

Menurut *syara'* hakim adalah orang yang di angkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan

¹Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka, 1977), h. 366.

²Tim penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 238.

³Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Cet. IV; Jakarta: Pradnya Paramita: 1979), h. 43.

⁴Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam Alih Bahasa Imran AM*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 20.

tugas peradilan.⁵ Sebagaimana nabi Muhammad saw telah mengangkat *qadi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.⁶ hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak atau wewenang yang dimiliki hakim untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada di dalam tuntutan karena jabatannya sebagai hakim.

Hak *ex officio* hakim adalah hak dan wewenang hakim karena jabatannya memberikan hak yang dimiliki oleh istri walaupun hal tersebut tidak ada dalam tuntutan rekonsiliasi istri dalam persidangan cerai talak yang di ajukan oleh suaminya.⁷

Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁸

2. Dasar Hukum Hak *Ex Officio*

Pasal 178 HIR ayat (3) dan pasal 189 RBg ayat (3) menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.⁹ Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Namun, dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan

⁵Tengku Muhammad Hasbi Ash-shidieqhy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), h. 29.

⁶Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam Alih Bahasa Imran AM*, h. 29.

⁷Ahmad Nur, Wawancara, Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, 4 april 2016.

⁸A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet. XI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 11.

⁹Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBG, dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 134.

sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami. Hal tersebut dapat dimaksudkan agar tercapai maslahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan hak *ex officio*. Dasar dilaksanakannya hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri” pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.

3. Penerapan Hak *Ex Officio* Dalam Hukum Acara Perdata

Hakim sebagai *judge made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hakim berwenang melakukan *contra legent* apabila ketentuan suatu pasal Undang-Undang bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan dan kesadaran masyarakat. Hakim sebagai organ utama dalam suatu Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.¹⁰ Misalnya pada perkara cerai talak hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”. Berdasarkan pasal 41

¹⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 6.

huruf c yang telah disebutkan di atas maka kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan *iddah*, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.

Sebagai perbandingan terhadap penerapan *ex officio* (pasal 41 huruf c Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan) yaitu pada putusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 mei 1970 menyatakan bahwa meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat mutlak menuntut sejumlah itu hakim berwenang untuk menetapkan beberapa sepentasnya harus di bayar dan dalam hal tersebut tidak melanggar pasal 189 RBg ayat (3) selama masih sesuai dengan kejadian materilnya.

B. Dasar Pertimbangan dalam Putusan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar dari putusan hakim. Bahwa hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan terhadap suatu perkara yang ditanganinya harus memuat alasan-alasan hukum *kanun* yaitu pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar tuntutan penggugat untuk mengabulkan dan atau tidak mengabulkan suatu tuntutan yang diajukan oleh penggugat, baik pasal-pasal yang dikemukakan oleh penggugat maupun yang tidak dikemukakan oleh penggugat di dalam petitumnya (pasal 184 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 195 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹ Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.¹² Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan

¹¹Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 232.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 223.

singkat tapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak dan menggambarkan bagaimana hakim dalam menkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang di ajukan oleh para pihak. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang di ajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.¹³

Dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam memutus perkara, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum *syara'*.¹⁴ Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan drajatnya dengan memperhatikan asas-asas, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁵ Sedangkan dasar hukum *syara'* usahakan mencarinya dari dalil Al-Qur'an, hadits, *qaul fuqaha'*, yang diterjemahkan dalam bahasa hukum.¹⁶

2. Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang

¹³A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Cet. XI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 263-264.

¹⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), h. 207.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97.

¹⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 207.

bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang, harus mencari serta memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.¹⁷ Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Percantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan di terima masyarakat.¹⁸

3. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim

Dalam membuat putusan, hakim harus memuat *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum

¹⁷John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h. 3.

¹⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 126-127.

(*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional.¹⁹ Namun dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya. Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.

Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakikat keadilan menurut John Chritsman dibagi menjadi tiga macam yaitu teori keadilan retributif, korektif, dan distributif. Namun, secara umum teori keadilan menjadi dua macam yaitu teori keadilan retributif dan distributif. Keadilan retributif adalah keadilan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan. Sedangkan keadilan distributif yaitu keadilan yang berkaitan dengan pembagian nikmat (*benefits*) dan beban (*burdens*). Pada keadilan distributif, terdapat ketidaksepakatan terkait isi terhadap prinsip keadilan yang mengatur pembagian hak dan kewajiban dalam masyarakat.²⁰ Adapun penerapan keadilan dalam keputusan, yaitu harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggung jawabkan, baik secara instutif maupun rasional.²¹ Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa

¹⁹Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UIIS PRESS, 2006), h. 6.

²⁰John Christman, *Social and Political Philosophy: a Contemporary Introduction* (London: Routledge, 2002), h. 60-61.

²¹Mawardi, *Keadilan sosial Menurut John Rawls*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), h. 46-47.

kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.

4. Dasar Pertimbangan Hakim Dengan Metode Penemuan Hukum

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan.²² Sebab setiap peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber hukum bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.²³ Untuk itu, hakim dalam setiap putusannya selalu melakukan penemuan hukum, karena bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pemikiran manusia yang sangat bernuansa.²⁴

Hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangan *judicial power* (Kekuasaan Kehakiman) agar dapat menjatuhkan putusan yang mengandung rasa keadilan masyarakat, untuk itu harus dilepas dari belenggu kekakuan dan keterikatan juru bicara Undang-Undang menurut rumusan kata-kata yang mati, hakim sudah semestinya diberi kebebasan untuk menghidupkan rumusan kata-kata mati dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim mesti bebas dan merdeka dalam hal-hal menafsirkan rumusan Undang-Undang dengan berbagai metodologi interpretasi yang diajarkan oleh doktrin ilmu hukum, mencari dan menggali serta merumuskan kaidah-kaidah dan asas hukum di tengah-tengah perkembangan perubahan kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perubahan kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan keadaan serta berwenang melakukan *contra legent* apabila ketentuan suatu pasal Undang-Undang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi dan keadaan yang berkembang

²²Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 278.

²³Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 25.

²⁴Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 279.

dalam kesadaran masyarakat.²⁵ Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim, mengandung aura nilai pancasila dan nilai kontitusi dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta memancarkan pertimbangan nilai filosofis yang konkret ditandai dengan ketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁶

Selain berpedoman pada hukum tertulis, hakim juga wajib menemukan hukumnya dengan menggali hukum berdasarkan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat serta alat bukti yang di ajukan oleh para pihak dalam persidangan.²⁷ Dalam menemukan fakta dan peristiwa dalam persidangan, hakim harus mengkostatir dan mengkualifisir fakta dan peristiwa tersebut agar ditemukan fakta dan peristiwa yang konkret. Untuk selanjutnya mengkostituir, menetapkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

C. Proses Penemuan Hukum Oleh Hakim

Pada penemuan hukum (*rechtsvinding*) di Peradilan selalu terdapat dua hal yang mendasar, yaitu hubungan antara tugas hakim dengan Undang-Undang. Dalam hal ini, yang menjadi permasalahan adalah hubungan seberapa besar eksistensi Undang-Undang dengan fakta konkret yang diperiksa oleh hakim. Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat dua hal yang menjadi dasar hukum, yaitu:²⁸

Bagi kaum dogmatik, hukum merupakan peraturan tertulis yaitu undang-undang. Dalam hal ini, tugas hakim adalah menghubungkan antara fakta konkret

²⁵ Ahmad Kamil dan M. fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 31-32.

²⁶ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakata: Kencana, 2012), h. 306.

²⁷ Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 278.

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 102.

yang diperiksanya dengan ketentuan Undang-Undang. Pada proses penghubungan antara fakta konkret yang diperiksanya dengan ketentuan Undang-Undang, terdapat dua kemungkinan yaitu: pertama, proses penerapan hukum oleh hakim. Pada proses ini, hakim hanya menggunakan hukum logis, yaitu silogisme. Kedua, proses pembentukan hukum oleh hakim. Pada proses ini, hakim tidak hanya sekedar menggunakan hukum-hukum logika, namun juga memberikan penilaian. Proses ini disebut dengan interpretasi dan konstruksi hukum.

Bagi kaum nondogmatik, hukum tidak hanya sekedar kaidah, namun juga kenyataan dalam masyarakat. Hal ini, memiliki konsekuensi bahwa Undang-Undang bukan satu-satunya hukum, melainkan terdapat beberapa sumber hukum lain, yaitu: traktat, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, kaidah Agama bahkan nilai-nilai kepatuhan yang ada di masyarakat, pada prinsipnya yang menyelesaikan persengketaan antara para pihak bukanlah aturan hukum yang terdapat dalam hukum tertulis, melainkan aturan hukum yang lahir dari penilaian hakim. Sedangkan hukum tertulis dan tidak tertulis hanyalah sebagai sumber dalam penilaian hakim dalam penemuan hukum. Dengan kata lain, putusan hakim tersebut merupakan hukum dalam arti yang sebenarnya dalam perkara konkret yang diperiksa.²⁹

Pada praktik di Peradilan tidak jarang ditemukan peristiwa yang belum atau tidak diatur dalam hukum atau perundang-undangan, atau jika sudah diatur tetapi tidak lengkap atau tidak jelas. Bahkan Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Perilaku berpendapat bahwa hukum dalam bentuk teks atau perundang-undangan adalah dirumuskan dengan sengaja secara rasional. Namun, pada realitanya hukum telah mengalami pergeseran bentuk, dari hukum yang muncul serta merta (*interactional law*) menjadi hukum yang dibuat dan

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h. 103.

diundangkan (*legislated law*).³⁰ Terkait dengan hal tersebut, kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah teks tidak akan mampu mewadahi keseluruhan kehidupan masyarakat atau peristiwa hukum. Sejak menjadi hukum dalam teks, bahasa yang mengambil alih. Sehingga bentuk hukum sekarang adalah sesuatu yang berbentuk kebahasaan atau sebuah “*language game*”. Oleh karena itu, peraturan hukum yang jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya, agar peraturan hukum dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum, sehingga dapat kembali kepada hukum yang datang serta merta (*interactional law*).³¹

1. Pengertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang konkret.³² Agar lebih mudah memahami pengertian ini dari penemuan hukum, maka yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh subjek atau pelaku penemuan hukum dengan upaya penerapan peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret berdasarkan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip tertentu yang dapat dibenarkan menurut ilmu hukum seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain.³³

2. Dasar Hukum Penemuan Hukum

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

³⁰Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: PT Kompas Nusantara, 2009), h. 11.

³¹Satjipto Raharjo, *Hukum dan perilaku*, h. 14-15.

³²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 2.

³³Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UIIS PRESS, 2006), h. 29-30.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kata “Merdeka” dalam Undang-Undang diatas, berarti bebas. Kebebasan peradilan juga berarti kebebasan hakim, yaitu bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial.³⁴ Kebebasan hakim yang demikian, memberikan tanda bahwa hakim berwenang untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa.

b. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman menyatakan:

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Berdasarkan pasal diatas, terlihat bahwa hakim dalam menemukan hukum harus berada dalam system hukum, tidak boleh keluar dari hukum.

c. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No.. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang berbunyi:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kata “Menggali” pada Undang-Undang diatas menunjukkan bahwa pada hakikatnya hukum telah ada, namun tersembunyi. Adapun untuk menampakkan hukum tersebut, harus digali serta dicari dan ditemukan terlebih dahulu.

d. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang berbunyi:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Pada pasal di atas telah jelas menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun, ketika perkara telah masuk ke pengadilan, maka hakim wajib untuk menyelesaikan perkara tersebut dan menemukan hukumnya.

³⁴Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, h. 60.

e. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang berbunyi:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali.

3. Prosedur Penemuan Hukum

a. Tahap Mengkostatir

Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkrit yang menjadikan dasar gugatannya. Peristiwa konkrit itu pulalah yang menjadi titik tolak hakim dalam memeriksa dan mengadili.³⁵

Tergugat di persidangan mengemukakan peristiwa konkrit juga sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan tergugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat yang sama dengan peristiwa konkrit yang di ajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Kemungkinan kedua adalah bahwa peristiwa konkrit yang di ajukan oleh tergugat sama sekali tidak sama dengan peristiwa konkrit dari penggugat. Sedangkan kemungkinan ketiga adalah bahwa peristiwa konkrit dari tergugat ada yang tidak sama dengan peristiwa dari penggugat, tetapi ada juga yang sama.

Setelah itu dibukalah kesempatan jawab manjawab di persidangan antara penggugat dan tergugat yang tujuannya adalah agar hakim dapat memperoleh peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak.

Dari jawab menjawab hakim akan dapat menyimpulkan peristiwa konkrit apakah yang sekiranya disengketakan. Hakim harus mengkostatir peristiwa konkrit yang di sengketakan. Mengkostatir berarti menyatakan benar terjadinya

³⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* Edisi Ketujuh, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), h. 200.

peristiwa konkrit. Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Baru setelah peristiwa konkrit dibuktikan maka dapatlah hakim mengkonstatir ada atau terjadinya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus bersandar pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum.³⁶ Dalam tahap konstatir ini kegiatan hakim bersifat logis.

b. Tahap Mengkualifisir

Pada tahap ini, hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkrit yang telah dianggap benar-benar terjadi termasuk hubungan hukum apa atau bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.³⁷ Apabila peristiwa hukum telah terbukti dan peraturan hukum jelas, maka penerapan hukum akan mudah namun apabila hukumnya tidak jelas atau tidak tegas, maka hakim tidak hanya menemukan hukum, tetapi hakim harus menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat.

c. Tahap Mengkonstituir

Pada tahap ini, hakim menetapkan hukum terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Sir Alfred Denning, seorang hakim inggris yang terkenal. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus

³⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 54-55.

³⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 55.

menentukan hukum *in-konkreto* terhadap peristiwa tertentu, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*).³⁸ Pada tahap ini hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa tindakan yang melawan hukum.³⁹

D. Tinjauan Umum Asas *Ultra Petitum Partium*

1. Pengertian Asas *Ultra Petitum Partium*

Ultra petitum partium adalah istilah hukum yang terdiri dari dua kata yaitu *ultra* dan *petitum partium* atau lebih dikenal dengan *petita*. Kata *ultra* mempunyai arti sangat, ekstrim dan lebih (berlebih-lebihan), sedangkan kata *petitum partium* (*petita*) mempunyai arti permohonan, tuntutan setelah gugatan (surat gugat) dimulai dengan menggunakan dalil-dalil dan diakhiri atau ditutup mengajukan tuntutan (*petitum*).⁴⁰ Menurut Subekti Tjitrosoedibio, yang dimaksud dengan *ultra petitum* (*petita*) adalah pengajuan permohonan yang putusannya melebihi dari tuntutan dalam posita permohonan perkara.⁴¹ Jadi, yang dimaksud dengan asas *ultra petitum partium* adalah larangan kepada hakim untuk memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut.⁴²

2. Dasar Hukum dan Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Hukum Acara Perdata

Tuntutan (*petitum*) yaitu memformulasikan apa yang diminta dan diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan terdiri dari tuntutan *primair* dan tuntutan *subsidiar*. Tuntutan *primair* terdiri dari tuntutan pokok yang merupakan tuntutan utama yang dikehendaki

³⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 56.

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, 2002), h. 154.

⁴⁰ Martinus Sahranidan Ilham gunawan, *Kamus Hukum*, h. 154.

⁴¹ Subekti Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, h. 98.

⁴² Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 20.

penggugat sebagaimana yang ia uraikan dalam *posita* dan tuntutan tambahan sebagai pelengkap tuntutan seperti biaya perkara yang dituntut untuk dibebankan kepada tergugat.⁴³ Untuk itu dalam tuntutan (*petitum*) harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolak tuntutan tersebut oleh hakim.⁴⁴ Adapun asas-asas penting yang digariskan dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, serta pasal 50 RV adalah terkait hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan.⁴⁵

Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBg telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Demikian pula dengan sistem hukum acara di Eropa, baik yang lama maupun yang modern, tidak memperbolehkan hakim menjatuhkan putusan “*ultra petita partium*” (melebihi tuntutan) dan HIR melarang hakim untuk memberi putusan yang tidak dituntut atau untuk meluluskan lebih dari apa yang dituntut.⁴⁶ Pada prinsipnya, setiap *ultra petita* dikategorikan melampaui batas wewenang. Menurut pasal ini, hakim atau Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dalam dalil (*fundamental petendi*) dan *petitum* gugatan. Tindakan demikian, dianggap

⁴³Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-qadha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 7.

⁴⁴Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 32.

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), h. 186.

⁴⁶H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 37.

pelanggaran atau pelampauan batas wewenang yang disebut *ultra petita* (*ultra petitum partium*). Putusan yang dijatuhkan, dianggap mengandung *ultra vires*, karena hakim atau pengadilan bertindak melampaui batas wewenangnya. Oleh karena itu, setiap putusan yang mengandung *ultra petita* atau *ultra vires* dianggap putusan yang melampaui batas wewenang, serta dapat dinyatakan cacat (*invalid*) dan harus dibatalkan.⁴⁷

Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang berhubungan asas *ultra petitum partium* tersebut beraneka ragam karena ada putusan Mahkamah Agung yang seolah-olah membenarkan putusan hakim yang melanggar asas *ultra petitum partium* tersebut dan ada putusan Mahkamah Agung yang melarang atau tidak membenarkan seorang hakim melanggar asas *ultra petitum partium*.⁴⁸ Namun, dalam praktik hakim memungkinkan untuk melakukan penyimpangan terhadap asas *Ultra Petitum Partium* dengan catatan hal tersebut dilakukan berdasarkan keadilan material yang apabila dalam *petitum* terdapat *et aqua et bono* (putusan lain yang seadil-adilnya)⁴⁹ terlepas dari pendapat tersebut, yang dimaksud dengan pelampauan batas mengadili dalam arti luas, tidak hanya terlepas pada soal yuridiksi atau kompetensi, tetapi meliputi segala pelampauan wewenang yang tidak sesuai dengan hukum acara (*undue process of law*).

Pada prinsipnya, berdasarkan pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg serta pasal 50 RV menghendaki bahwa hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi

⁴⁷M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 317.

⁴⁸R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Cet; XII Jakarta: Pardnya Paramita, 1993), h. 20.

⁴⁹Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 229.

gugatan yang diajukan. Hakim tidak diperbolehkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Begitu pula halnya dengan apabila ada gugatan reconvensi, hakim wajib mempertimbangkan dan memutus tidak hanya gugatan konvensinya saja tetapi juga gugatan reconvensinya. Apabila dalam suatu putusan, hakim hanya mempertimbangkan dalam memutus gugatan konvensinya saja padahal tergugat mengajukan reconvensinya, maka cara demikian bertentangan dengan asas yang digariskan pasal 189 ayat (2) RBg.

E. Akibat Hukum

1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atau suatu tindakan subjek hukum.⁵⁰ Tindakan yang dilakukan subjek hukum merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁵¹ Akibat hukum merupakan sumber lain dari hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Dengan kata lain, akibat hukum dapat dikenakan baik pada:

- a. Tindakan hukum atau perbuatan hukum
- b. Delik, baik delik dalam bidang hukum pidana (perbuatan pidana) maupun delik dibidang hukum privat (perbuatan melawan hukum).⁵²

2. Ruang Lingkup Akibat Hukum

Perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum data berwujud:

⁵⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h. 192.

⁵¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 71.

⁵² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT Gunung Agung Tbk, 2002), h. 252.

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu, misalnya mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan hukum baru yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak.⁵³
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Misalnya sejak pembeli barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara keduanya.⁵⁴
- c. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan, misalnya dalam bidang hukum perdata dikenal sanksi, baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Misalnya dalam keadaan kebakaran dimana seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri.

3. Akibat Hukum Hak *Ex Officio* Terhadap Asas *Ultra Petitem Partium*

Pada prinsipnya, berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBg, serta pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (asas *ultra petitem partium*). Menurut Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi *posita* maupun *petitem* gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui

⁵³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h. 193.

⁵⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h. 192-193.

wewenangannya *beyond the power of his authority*. Apabila putusan mengandung *ultra petitem partium* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal tersebut dilakukan hakim dengan itikad baik *good fait* maupun sesuai dengan ketentuan umum (*public interest*). Akan tetapi dalam praktik beracara dilingkungan Peradilan Agama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim karena jabatannya *ex officio* dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Pengecualian terhadap penerapan asas *ultra petitem partium* ini sifatnya sangat kasuistik artinya tidak dalam semua kasus yang masuk ke Pengadilan, hakim memutuskannya dengan menggunakan hak *ex officio*.

F. Tinjauan Umum Cerai Talak

1. Pengertian Cerai Talak

Cerai talak terdiri dari 2 kata, cerai dan talak. Cerai ialah terputusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri.⁵⁵ Sedangkan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama.⁵⁶ Dengan demikian cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dan istrinya, dengan talak yang diucapkan suami di depan Pengadilan Agama.⁵⁷

Untuk itulah, hakikat cerai talak ialah yang diucapkan suami terhadap istrinya, setelah ada putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum tetap.

2. Prosedur Pemeriksaan Cerai Talak

Bentuk cerai talak diatur dalam bab IV, bagian kedua paragraf 2. Pada dasarnya proses pemeriksaan perkara cerai talak tidak banyak berbeda dengan

⁵⁵Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁶Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁷Arhum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, h. 17.

cerai gugat.⁵⁸ Adapun prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai talak diatur dalam pasal 66 s/d 72 Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dan satu-satunya lembaga legal formal dijamin oleh hukum yang berlaku, yang mengizinkan suami untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya adalah Pengadilan Agama.⁵⁹ Cerai talak harus didahului oleh adanya permohonan cerai talak dari seorang suami yang hendak menceraikan istrinya. Permohonan diajukan seorang suami kepada Pengadilan Agama, agar ia dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya. Permohonan tersebut dapat diajukan secara tertulis maupun lisan, langsung atau melalui kuasanya kepada Pengadilan Agama. Permohonan dibuat sedemikian rupa sesuai atauran. Secara formal berisikan identitas para pihak, *posita* (duduk perkara), dan *petitum* (tuntutan). Permohonan memuat nama, umur, dan tempat kediaman pemohon dan termohon. Ikrar talak suami sebagai pemohon baru dapat dilaksanakan setelah penetapan izin ikrar tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Permohonan cerai talak dapat diajukan di Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, kecuali:

⁵⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 234.

⁵⁹Arhum Hoerudin, *Pengadilan Agama Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, h. 18.

- b. Jika termohon (istri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon (suami), maka permohonan cerai talak dapat diajukan kepada Pengadilan Agama daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (suami).
- c. Jika termohon (istri) bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (suami).
- d. Jika pemohon (suami) dan termohon (istri) bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan pemohon termohon (suami-istri) dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama jakarta pusat.

Dalam kenyataan di lapangan, perkara permohonan cerai talak yang diajukan kepada Pengadilan Agama biasa dan sering terjadi memuat permohonan soal lain, seperti pengusasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersamasuami istri. Permohonan secara komulatif ini dibolehkan oleh undang-undang. Karenanya permohonan soal penguasaan anak, pengurusan anak, nafkah anak, nafkah istri, nafkah iddah dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun diajukan sesudah ikrar talak di ucapkan.

Dalam perkara cerai talak yang berkaitan dengan nafkah istri sering terlewatkan oleh suami, banyak kejadian seorang suami yang menceraikan istrinya tapi tidak memenuhi kewajibannya ialah memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Dan jika seorang istri yang kurang paham mengenai hal itu dan tidak mengajukan rekonvensi maka dalam putusan hakim tidak menetapkan suami memberikan nafkah istri. Akan tetapi dengan hak *ex officio* seorang hakim, hakim dapat menetapkan istri diberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dengan hakim mempelajari posita yang di ajukan kepadanya maka jika seorang istri terbukti

tidak *nuyuz* atau durhaka kepada suaminya maka istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dari mantan suaminya.

Adapun Asas-asas pemeriksaan perkara cerai talak yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdiri dari:

a. Asas Pemeriksaan oleh majelis hakim

Asas ini adalah asas pertama yang diatur dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang menegaskan: pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim”. Ketentuan pasal 68 ayat (1) tersebut merupakan aturan pelaksanaan ketentuan pasal 15 Undang-Undang No. 14 tahun 1970. Berdasarkan ketentuan pasal 15 dimaksud, semua Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Salah seorang dari mereka bertindak sebagai ketua majelis, sedangkan dua orang lagi bertindak sebagai hakim anggota sidang. Demikian ketentuan umum harus ditaati, bahkan kalau berpedoman secara analogis kepada penjelasan pasal 40 undang-undang No. 14 Tahun 1985 majelis hakim boleh lebih dari tiga (3) orang. Namun jikapun lebih dari 3 (tiga) orang maka jumlahnya harus ganjil.

Pemeriksaan perkara cerai talak harus dilakukan dengan majelis hakim, kecuali apabila di suatu pengadilan benar-benar tidak mungkin dilakukan pemeriksaan dengan majelis hakim yang tidak memadai.

b. Asas pemeriksaan sidang Tertutup

Asas ini diatur dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 yang sama ketentuannya dengan peraturan pemerintah Tahun 1975. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan apabila tidak

terjadi perdamaian, pemeriksaan gugatan. Kemudian berpedoman kepada penjelasan pasal 33 peraturan pemerintah Tahun 1975, pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian meliputi segala pemeriksaan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi.

Ketentuan pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup merupakan pengecualian dari asas umum yang ditentukan pasal 17 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Menurut asas umum semua pemeriksaan perkara harus dilakukan dalam sidang pemeriksaan di pengadilan yang terbuka untuk umum. Namun asas ini dapat disingkirkan apabila Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pasal 68 ayat (2) jo pasal 80 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan lain, maka khusus dalam pemeriksaan perceraian harus dilakukan dalam sidang tertutup. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pemeriksaan dan putusan dinyatakan batal, dan harus diadakan lagi pemeriksaan ulang dalam sidang tertutup.

Selain itu mesti di Bngat ketentuan pasal 18 Undang-Undang RI. No 14 tahun 1970 jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang menegaskan , sekalipun pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

c. Asas pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran

Pasal 68 ayat (1) dan pasal 131 KHI memerintahkan agar pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat permohonan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk memenuhi asas yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dikenal dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

d. Asas Pemeriksaan *in person* atau kuasa

Pemeriksaan perkara cerai talak, tidak berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata pada umumnya. tidak mutlak mesti penggugat atau tergugat in person yang menghadiri pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengadilan atau tergugat dapat diwakili oleh kuasa, asalkan didukung dengan surat kuasa khusus. Kecuali dalam sidang perdamaian, pemohon dan termohon harus datang menghadiri “secara pribadi” tidak bisa diwakilkan oleh kuasa. Demikian ditentukan dalam pasal 82 ayat (2). Ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum hukum acara perdata, dimana kuasa dapat mewakili kepentingan pihak pemberi kuasa sekalipun dalam sidang perdamaian.

e. Asas Usaha mendamaikan dalam sidang perdamaian

Pasal 70 ayat (1) jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI No. 7 tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam menugaskan kepada hakim untuk berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian. Tugas mendamaikan merupakan upaya yang harus dilakukan hakim pada setiap sidang berlangsung sampai putusan dijatuhkan.

3. Gugatan rekonsensi pada perkara cerai talak

Pengertian gugatan rekonsensi menurut pasal 132 a ayat (1) HIR, hanya memberi pengertian singkat. Maknanya menurut pasal itu adalah:

- a. Rekonsensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya,, dan
- b. Gugatan rekonsensi itu diajukan tergugat kepada Pengadilan, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.

Istri (termohon) dalam perkara cerai talak berhak mengajukan gugat rekonsensi. Hal ini dibenarkan hukum acara sebagaimana diatur dalam pasal 132 huruf a dan b HIR atau pasal 157 dan 158 RBg. Menurut M. Yahya Harahap tujuan gugatan rekonsensi adalah:

1. Menegaskan asas peradilan sederhana, sesuai dengan pasal 132 b ayat (2) HIR, gugatan rekonvensi dan konvensi diputus secara serentak dan bersamaan dalam suatu proses dan dituangkan dalam satu putusan. Sistem yang menyatukan pemeriksaan dan putusan dalam satu proses sangat menyederhanakan penyelesaian perkara.
2. Menghemat biaya dan waktu, memperhatikan efektifitas dan efisiensi biaya dan waktu yang dihasilkannya.

Menurut Abdul Mannan, Tujuan gugatan rekonvensi adalah menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus mempermudah prosedur pemeriksaan, menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, menetralsir tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian dan menghemat biaya.⁶⁰

Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa tuntutan rekonvensi pada hakikatnya merupakan komulasi atau gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur.⁶¹

Berdasarkan hal diatas dalam perkara cerai talak istri dapat mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut hak-haknya akibat diceraikan oleh suaminya. Namun karena ketidaktahuan istri terhadap hak yang dimilikinya maka tidak jarang terkadang istri tidak mengajukan rekonvensi untuk menuntut haknya berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang RI No. 1 Tentang Perkawinan Pengadilan berhak memberikan hak yang dimiliki oleh para pihak sekalipun hal tersebut tidak terdapat dalam gugatan

⁶⁰Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 54.

⁶¹Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke-5*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 99.

konvensi maupun rekonvensi untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

4. Akibat Putusnya Ikatan Perkawinan Karena Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan "perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.⁶² Apabila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuk, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:⁶³

- a. Hubungan keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri;
- b. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikan sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri diceraikan sebelum digauli (*qabla al-dukhul*) dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun di Bmbangi dengan satu pemberian yaitu *mut'ah* berdasarkan pasal 158 KHI.
- c. Melunasi hutang yang wajib dibayar dan belum dibayar selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun nafkah;
- d. Berlaku bagi istri yang cerai ketentuan *iddah*;
- e. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.

Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa apabila putusnya ikatan perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami ataupun istri, maupun harta

⁶²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 189.

⁶³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 301-303.

bersama. Akibat hukum terkait anak yaitu apabila terjadi perceraian, maka baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara serta mendidik anak tersebut sedangkan untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan, bapak bertanggung jawab atas hal tersebut. namun apabila dalam kenyataan bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat memutus ibu untuk ikut memikul biaya tersebut. Akibat hukum terhadap bekas suami adalah Pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri., sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 huruf a, b dan c Undang-Undang R No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum terhadap harta bersama atau harta pencarian diatur dan diserahkan kepada para pihak yang bercerai mengenai hukum yang berlaku.

5. Dasar Hukum Talak

a. QS at-thalaq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (di Bzinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”⁶⁴

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: CV Darus sunnah, 2015), h. 559.

(hai nabi) makna yang dimaksud ialah umatnya, pengertian ini disimpulkan dari ayat selanjutnya. Atau makna yang dimaksud adalah katakanlah kepada mereka (apabila kalian menceraikan istri istri kalian) apabila kalian hendak menjatuhkan talak kepada mereka (maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi idahnya) yaitu pada permulaan iddah, seumpamanya kamu menjatuhkan talak talak kepadanya sewaktu ia dalam keadaan suci dan kamu belum menggaulinya. (dan hitunglah waktu iddahnya) artinya jagalah waktu iddahnya supaya kalian dapat merujukinya sebelum waktu *iddah* itu habis. (serta bertakwalah kepada Allah rabb kalian) artinya taatlah kalian kepada perintahnya dan larangannya. (janganlah kalian dikeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah kalian mereka di izinkan keluar) artinya isti yang sudah ditalak tidak boleh di dikeluarkan dari rumahnya sebelum *iddah*nya habis. (kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji) yakni zina. (yang terang) artinya dapat di buktikan. Maka bila ia melakukan hal tersebut dengan dapat dibuktikan atau ia melakukannya secara jelas maka ia harus dikeluarkan untuk menjalani hukuman *hudud*. (itulah) yakni hal hal yang telah disebutkan itu (hukum hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu) artinya sesudah perceraian itu (sesuatu hal yang baru) yaitu rujuk kembali dengan istri yang telah dicerainya, jika talak yang dijatuhkan itu baru sekali atau dua kali.⁶⁵

Berdasarkan tafsir ayat diatas maka menurut saya Allah menghalalkan talak bagi suami yang ingin pisah dengan istrinya tapi yang harus diperhatikan adalah suami mentalak istrinya harus dalam keadaan suci dan harus pula memperhitungkan masa iddahnya karena selama masa *iddah* istri tidak boleh

⁶⁵Tafsir Quraisy Shihab.

keluar rumah kecuali memang istri yang berbuat zina dan jikalau sewaktu-waktu dalam masa *iddah* itu suami ingin rujuk. Suami bisa rujuk dengan istri jika talak yang dijatuhkan suami adalah talak satu atau talak dua, karena kalau yang dijatuhkan suami adalah talak tiga maka suami istri tersebut tidak dapat rujuk kecuali istri menikah terlebih dahulu dengan orang lain dan *ba'da dukhul* lalu menikah dengan bekas suaminya dengan akad nikah yang baru.

b. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah

“Perbuatan yang halal paling dibenci Allah adalah talak”.

a. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya talak, maka talak dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:⁶⁶

- a. Talak *Sunni* ialah talak yang dijatuhkan sesuai tuntunan sunnah, yakni suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang dalam keadaan sucinya itu suami istri tidak mengadakan kontak seksual (bersetubuh).
- b. Talak *Bid'i* ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang dalam keadaan suci itu suami istri telah mengadakan persetubuhan.
- c. Talak *la Sunni Wala Bid'i* ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum pernah digauli, istri belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid, dan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Apabila talak dilihat dari segi cara mengucapkannya, maka talak terbagi kedalam dua bentuk yaitu:⁶⁷

⁶⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 193.

⁶⁷Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 194.

- a. Talak *Sharīh* yaitu talak yang diucapkan oleh suami secara jelas dan gamblang dengan kata-kata talak.
- b. Talak *Kinayah* yaitu talak yang diucapkan suami tanpa mempergunakan kata-kata talak secara tegas tetapi dengan sindiran yang dapat bermakna talak.

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali setelah terjadinya talak atau perceraian, maka talak terbagi dua yaitu: ⁶⁸

- a. Talak *Raj'i* yaitu talak satu atau talak dua tanpa 'iwad (penebus talak) yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah, suami dapat merujuk kembali tanpa akad kepada istrinya.
- b. Talak *Ba'in* yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap istrinya dan untuk rujuk kembali harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.
 - 1) *Ba'in sugra* yaitu talak satu atau dua disertai dengan 'iwad dari istri kepada suami yang dengan akad nikah baru, suami dapat kembali rujuk dengan bekas istrinya.
 - 2) Talak *Ba'in kubra* yaitu talak tiga, suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan seksual dan habis masa iddah nya.

b. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:⁶⁹

- a. Suami

⁶⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. V; Jakarta Universitas Indonesia Press, 1986), h. 103.

⁶⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 201-205.

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan berakal, baligh dan atas kemauan sendiri.

b. Istri

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan istri yang ditalak masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami dan kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran). Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula dengan niat talak yang masih berada dalam pikiran dan tidak diucapkan,

d. Qashdu (Sengaja)

Ucapan talak yang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan jenis Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, untuk memperoleh informasi tentang penerapan hak *ex officio* yang dimiliki hakim karena jabatannya dalam memutuskan perkara cerai talak yang diajukan kepadanya, untuk mengetahui kedudukan dasar hukum dan alasan hakim menerapkan hak *ex officio* serta mengetahui akibat hukum dari penerapan hak *ex officio* tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan guna mendapatkan data yang diperlukan.¹ Dalam operasionalnya sumber data diambil dari Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B sebagai lokasi penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah suatu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasarkan aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 21.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah suatu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut, apakah suatu hal itu baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma syariat Islam.²

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Penelitian ini bercorak *field research*, oleh karena itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Data ini berkenaan dengan nilai kualitas.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan atau data yang diperoleh dari hasil wawancara. Seperti data tentang kedudukan dasar hukum hak *ex officio* terhadap RBg, data tentang alasan hakim menerapkan hak *ex officio*, dan data tentang akibat hukum dari penerapan hak *ex officio*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³ Seperti buku-buku Hukum Acara Perdata di Indonesia, data dari situs resmi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

²Sutrisno Hadi, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi offset, 1989) h. 142.

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 21.

3. Metode Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto menyebutkan ada tiga jenis alat metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan interviu.⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan :

a. Metode *interview*

Metode interviu adalah suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang dilakukan melalui wawancara. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sedangkan informan adalah orang yang memberikan informasi.⁵ Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah hakim-hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B dan pada penelitian ini peneliti tidak akan mewawancarai semua hakim namun dibatasi menjadi 2 orang hakim yang cukup mewakili menjawab permasalahan yang ada. Jenis wawancara yang digunakan dalam peneltian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, dalam wawancara jenis ini kreativitas pewawancara yang diperlukan.⁶

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan dengan mencari data secara tertulis, baik berupa catatan, dokumen atau arsip-arsip serta buku-buku yang lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

4. Instrumen pengumpulan data

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 21.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 145.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 270.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai penerapan hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daftar pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan ke informan untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat peneliti.

D. *Tenik Pengolahan dan Analisis Data*

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari lapangan kemudian di reduksi, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul di lapangan dengan penajaman teknik analisis, setelah itu didekskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian.

BAB IV

HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Profil Pengadilan Agama Sungguminasa

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1996, tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan Tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.¹

Kewenangan Pengadilan Agama saat itu adalah meliputi perkara-perkara yang dijelaskan peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri beragama Islam, dan perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Agama Islam yang berekenaan dengan nikah, talak, rujuk, *fasakh*, nafkah, maskawin, tempat kediaman (*maskan*), *mut'ah*, *hadhanah*, perkara waris, wakaf, hibah, shadaqah, baitulmal, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu.

Penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa pada hakikatnya isi dan wewenang Pengadilan Agama Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 sama dengan peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1957 sebagaimana yang dijelaskan di paragraf sebelumnya, sehingga adanya pencabutan peraturan sebelumnya. Akan tetapi pembentukan peraturan pemerintah Np. 45 Tahun 1957 ini diharapkan berlaku secara efektif dan integratif dengan pembentukan Pengadilan Agama

¹"Sejarah", *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa*. <http://pa-sungguminasa.go.id/profil-pengadilan/58-sejarah> (3 desember 2016)

yang semakin meluas di seluruh penjuru wilayah di Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah di daerah lainnya.

Selanjutnya dalam keberadaannya, Peradilan Agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan Hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Keberadaan Peradilan Agama dalam sistem peradilan Nasional Indonesia merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pertama kali diresmikan pada tanggal 29 Mei 1967 yang beralamat di jalan Andi Mallombassarang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, kecamatan somba opu, kabupaten gowa, dan gedung baru Pengadilan Agama Sungguminasa sejak tahun 2009 beralamat di Jalan masjid raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.²

a. Kondisi Geografis

Adapun kondisi atau letak geografis kantor Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

- 1) Letak astronomi gedung kantor : 5°11'55.6 LS - 119°27'11.3 BT
- 2) Letak astronomi gedung kantor 9kec. Somba opu):
 - Utara : Kota Makassar
 - Selatan : Kecamatan Palangga dan Kecamatan Bontomarannu
 - Timur : Kecamatan Patalassang
 - Barat : Kecamatan Pallangga
- 3) Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut.
- 4) Kota Sungguminasa beriklim tropis.

²“Profil Pengadilan’, *situs resmi Pengadilan Agama Sungguminasa*. <http://pa-sungguminasa.go.id/profil-pengadilan/57-profil-peng> (3 desember 2016)

b. Visi dan misi

- 1) Visi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah “mewujudkan lembaga yang memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggara peradilan dan pelayanan”.
- 2) Misi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah “Terwujudnya standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan, menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh masyarakat, meningkatkan kinerja peradilan berbasis teknologi informasi dan mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja”.³

Untuk mencapai visi mewujudkan lembaga yang memberi jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan, Pengadilan Agama Sungguminasa khususnya para hakim melaksanakan kebijakannya sebagai hakim agar terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan kebijakannya dapat berupa penerapan hak *ex officio* hakim. Selain itu Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan berbagai program pebenahan, peningkatan serta perwujudan dan menyentuh seluruh bidang *stakholder* terkait, dan berupaya memperkuat *supporting unit* yang ada yang keseluruhannya tertuju pada pelayanan pencari keadilan.

c. Tugas pokok dan fungsi

- 1) Tugas pokok

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan Tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara

³“Visi dan Misi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa*. <http://pa-sungguminasa.go.id/profil-pengadilan/23-visi-dan-misi> (3 desember 2016).

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan Ekonomi syariah.

2) Fungsi

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai Fungsi, antara lain sebagai berikut:

a.) Fungsi mengadili (*judicial review*)

Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.

b) Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

c) Fungsi pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekertaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewaananya (vide: pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

d) Fungsi nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

e) Fungsi administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian), keuangan, dan umum/perlengkapan).

f) Fungsi lainnya

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, dan lainnya
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VI BI/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

Data pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa:

- 1) Drs. Ahmad Nur, M.H. (Ketua)
- 2) Uten Tahir, S. HI., M. HI (Hakim)
- 3) Maryam Fadhillah Hamdan, S.H.I. (Hakim)
- 4) Andi Maryam Bakri, S. Ag., M. Ag. (Hakim)
- 5) Dr. Muhammad Najmi Fajri , S. HI., M. HI. (Hakim)
- 6) Muhammad Anwar Umar, S.Ag. (Hakim)
- 7) Ahmad Jamil, S.Ag. (Hakim)
- 8) Hasbi, S.H. (Panitera Sekretaris)
- 9) Tadjuddin Maslan, S.H. (Wakil Panitera)
- 10) Dr. Yusran (Wasek)
- 11) Dra. Nadirah (Panmud Gugatan)
- 12) Kafrawi, B.A. (Panmud Hukum)
- 13) Dra. Hj. Fitriani (Panmud Permohonan)
- 14) Hj. St. Suhrah, B.A. (Panitera Pengganti)
- 15) Dra. Djasrawati (Panitera Pengganti)

- 16) Mukarramah Saleh, S.H. (Panitera Pengganti)
- 17) Rahmatiah, S.H. (Panitera Pengganti)
- 18) A. M. Zulkarnain Chalid, S.H. (Panitera Pengganti)
- 19) Drs. H. S. Ahmad Abbas (Panitera Pengganti)
- 20) Darmawati, S.Ag. (Panitera Pengganti)
- 21) Nur Intang, S.Ag. (Panitera Pengganti)
- 22) Drs. Misi, S.Ag. (Panitera Pengganti)
- 23) Drs. M. Noor AR (Panitera Pengganti)
- 24) Hasbiah, S.H. (Panitera Pengganti)
- 25) Dra. Hj. Musafirah (Panitera Pengganti)
- 26) Ibrahim, S.H. (Panitera Pengganti)
- 27) Dra. I Damri (Panitera Pengganti)
- 28) Erni, S.H. (Kaur Umum)
- 29) Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H. (Kaur Kepegawaian)
- 30) Taufiq Hasyim, S.Ag. (Kar Keuangan)
- 31) Muhammad Aleks, S.H. (Jurusita)
- 32) Purnama Santi (Jurusita Pengganti)
- 33) Bachra, S.H.I. (Jurusita Pengganti)
- 34) Maryanti, S.H.I. (Jurusita Pengganti)
- 35) Haeruddin, S.H. (Jurusita Pengganti)
- 36) Sirajuddin (Jurusita Pengganti)
- 37) Very Setya Widyatama (Jurusita Pengganti)
- 38) Muh. Luthfi Usman (Bendahara)
- 39) Muh. Riska Prakarsa Kadang, S.E. (Staf)
- 40) Andi Suryani M, S.Kom. (Staf)
- 41) Muhamamd Rusydi As'ad, S.H. (Staf)

B. Kedudukan Dasar Hukum Hak Ex Officio Hakim Terhadap RBg

Ex officio berarti karena jabatan artinya *ex officio* itu ada karena ada kewenangan yang diberikan hukum untuk seseorang bertindak sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Seorang presiden juga memiliki hak *ex officio* yang disebut dengan hak prerogatif. Dalam rana hukum yang memiliki hak *ex officio* hanyalah hakim.⁴ Mengenai hak *ex officio* hakim erat kaitannya dengan hukum acara perdata, hukum acara perdata yang berlaku di daerah Sulawesi Selatan adalah RBg, RBg merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah luar Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di Negara kita hingga kini.⁵ Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang RI No. 50 tahun 2009, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang ini.⁶

Menurut pasal di atas Hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber (garis besarnya) kepada 2 aturan, yaitu (1) yang terdapat dalam Undang Undang RI No. 50 Tahun 2009, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum antara lain:

1. HIR (*Het Heziene Inlandsche reglement*) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang di Baharui).

⁴Muhammad Anwar Umar, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

⁵H.Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Cet V; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2009), h. 13.

⁶R. soeroso, *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang*, (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 260.

2. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglement untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar jawa-madura.
3. Rsv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan belanda dahulu berlaku untuk raad van justitie.
4. BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut jga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.
5. Undang Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang RI No. 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
2. Undang Undang RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
3. Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan pelaksanaannya.

Jadi demikian halnya Peradilan Agama dalam Hukum Acaranya minimal harus memperhatikan Undang Undang RI No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas.⁷

Berdasarkan Pasal 189 ayat (3) RBg mengatur tentang hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan sesuatu yang tidak terdapat dalam *petitum* karena itu merupakan *ultra petitum partium* yang melarang hakim mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Salah satu asas Hukum Acara Perdata adalah hakim bersifat pasif, dalam perkara perdata hakim

⁷H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2010), h. 21.

bersifat pasif artinya hakim dilarang mencari-cari perkara, ruang lingkup atau luas pokok sengketa ditentukan para pihak. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan peraturan yang diterapkan undang undang dijalankan oleh para pihak.

Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Asas ini disebut *verhandlungsmaxime*. Jadi pengertian pasif ini yaitu bahwa hakim tidak menentukan luas daripada pokok perkara. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim tidak aktif sama sekali. Selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin dan memeriksa perkara dan tidak merupakan sekadar pegawai atau alat daripada para pihak dan haruslah sekeras-kerasnya mengatasi berbagai hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan.⁸

Bahwa pasal 189 (3) RBg tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara dan memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.⁹

Mengenai *Ex officio* di atur dalam pasal 41 huruf c Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal ini menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”¹⁰. kata “dapat” memberikan penafsiran bahwa hakim diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak melalui hak *ex officio* yang dimilikinya meskipun

⁸Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Cet II; Jakarta: PT. Prenadamedia Group: 20016), h. 10.

⁹Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

¹⁰Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hal itu tidak ada di dalam *petitum* surat permohonan cerai talak yang di ajukan oleh pemohon dan juga tidak ada dalam *petitum* rekonvensi yang diajukan termohon selain dalam pasal tersebut, Mahkamah Agung juga dalam putusannya tanggal 23 mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa “meskipun tuntutan ganti kerugiannya jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar pasal 189 RBg (3)”. Kemudian pada putusannya MA tgl. 10-11-1971 No. 556 K/Sip/1971 hubungan antara putusan dengan gugatan “Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian materil”. Landasan filosofi dari *ex officio* adalah memberikan perlindungan kepada para pihak agar terwujudnya peradilan yang adil.¹¹ Meskipun hakim diberikan kewenangan untuk memberikan sesuatu yang tidak terdapat dalam *petitum* tapi bukan berarti hakim dapat berlaku sewenang-wenang melainkan hakim dalam memutuskan perkara selalu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara dengan *ex officio*nya tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.¹²

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur yatu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Agar ketiga unsur tersebut terpenuhi maka hakim dalam perkara cerai talak harus aktif, dengan menggunakan hak *ex officio* sesuai dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya *ex officio* diterapkan untuk memberikan keadilan kepada para pihak.

¹¹Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

¹²Muhamad Anwar Umar, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

Bahwa dalam pasal 149 KHI telah diatur tentang bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik itu berupa uang ataupun benda. Kecuali mantan istrinya tersebut *qabla ad-dukhul*.

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى
الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتْنَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

- b. Memberikan nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa iddah kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Allah SWT berfirman dalam QS at-talaq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
خُرْجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (di izinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka

Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”¹³

Menurut saya dari ayat tersebut terlihat jelas bahwa Allah memerintahkan kepada para suami yang hendak menceraikan istrinya agar mereka tetap memberikan nafkah maskan yaitu tempat tinggal dan kiswah yaitu pakaian selama masa iddah.

Adapun ketentuan tentang lama iddah istri yang di talak terdapat dalam pasal 153 Ayat 2 KHI:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhul* waktu tunggu ditetapkan 130 hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan samai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kembali ditegaskan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali ia *nusyuz*.

Di lingkungan Peradilan Agama Dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara khusus, yang diatur dalam;

¹³Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), h. 559.

1. Undang Undang RI No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2. Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975
3. Intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁴

Ex officio tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata secara umum, Hukum Acara Perdata secara umum yang dimaksud disini adalah RBg karena ketika RBg disandingkan dengan Undang-Undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam pasal keduanya ada yang bertentangan maka yang berlaku adalah asas. Asas yang berlaku pada masalah ini adalah *lex specialis derogate les generalis*. Dimana kita ketahui Undang Undang RI No. 1 Tentang perkawinan lebih khusus membahas tentang perkawinan saja dan pelaksanaannya sedangkan RBg lebih umum membahas tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia maka Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut mengenyampingkan Hukum Acara Perdata secara umum yaitu RBg, Akan tetapi ketika peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan yang secara hierarki lebih di bawah kedudukannya maka kita kembali ke susunan hierarki perundang-undangan. Peraturan yang lebih rendah tingkatannya pada hierarki tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya pada hierarki.¹⁵

Berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan republik Indonesia adalah sebagai berikut:

¹⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet. IV; Yogyakarta, 2005), h. 205.

¹⁵Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang Undang /perppu;
4. Peraturan pemerintah
5. Peraturan presiden;
6. Peraturan daerah provinsi;
7. Peraturan daerah kabupaten/kota¹⁶

Secara hierarki Undang Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan berada dalam urutan ketiga tertinggi setelah Undang Undang dasar 1945 dan ketetapan MPR, dan berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ahmad Nur secara hierarki RBg termasuk dalam Undang Undang /Perpu itu artinya RBg juga berada dalam urutan ketiga tertinggi setelah Undang Undang Dasar Tahun 1945 Dan ketetapan MPR, jadi secara hierarki kedudukan Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sama dengan kedudukan RBg itulah sebabnya ketika ada pasal diantara keduanya yang bertentangan maka yang berlaku adalah asas.¹⁷

Walaupun pada umumnya tidak ada sanksi apabila hukum positif tidak mengindahkan asas hukum, namun jika hal itu tersebut terjadi maka sangat mungkin hukum positif tersebut tidak atau kurang memenuhi dasar-dasar keberlakuan hukum yang baik. Dasar-dasar keberlakuan hukum yang baik adalah dasar filosofi, yuridis, maupun sosiologis.

Hakim sebagai *judge made law*, dan sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat, Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ia mengatakan

¹⁶Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁷Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

bahwa orang-orang yang berperkara di pengadilan wajib di berikan keadilan dan wajib mendapatkan semua yang menjadi haknya dan tak lupa mengerjakan kewajibannya. oleh karena itu hakim berwenang melakukan “*contra legent*” apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan dan kesadaran masyarakat.¹⁸

Hakim sebagai wakil tuhan mendapatkan perlindungan dari Allah Swt. Sesuai dengan hadis Amr bin al-ash telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

Apabila seorang hakim memutuskan hukum setelah berijtihad yang ternyata tepat maka dia mendapat dua pahala, dan apabila dia memutuskan hukum setelah berijtihad yang ternyata salah maka baginya satu pahala. H.R. Al-Bukhari.

Selain itu informan juga menegaskan bahwa *ex officio* tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata karena selain pasal 41 Huruf c Undang Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian yang dijadikan dasar hukum dalam putusannya maka yang dapat pula dijadikan dasar hukum hakim menerapkan hak *ex officio* adalah tuntutan subsidair dari pihak pemohon dimana tuntutan subsidair meminta putusan hakim yang seadil-adilnya jadi jika pihak istri tidak mengetahui ada haknya yang mesti dibayarkan pihak suami maka dengan *ex officio* nya hakim dapat memberikan putusan yang adil buat para pihak. Tuntutan *subsidair* ini biasanya dikenal dengan penerapan asas *et aqua et bono* atau memohon putusan hakim yang seadil-adilnya.¹⁹

Bukan hanya dalam cerai talak saja hakim dapat menggunakan hak *ex officio*nya berdasarkan hasil wawancara dengan informan *ex officio* juga bisa diterapkan dalam perkara cerai gugat jikalau istri tidak menuntut haknya maka

¹⁸Muhamad Anwar Umar, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

¹⁹Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

hakim berwenang memberikan putusan yang isinya menghukum suami memberikan apa yang telah menjadi hak mantan istri dan anaknya yang telah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

C. Alasan Hakim Menerapkan Hak Ex Officio di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B

Dalam praktik peradilan pertimbangan hukum disebut *considerans*, yang mana *considerans* merupakan dasar dari suatu putusan hakim bahwa hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan terhadap suatu perkara yang ditanganinya harus memuat alasan-alasan hukum yaitu pasal dari peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar tuntutan penggugat untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan suatu tuntutan yang diajukan oleh penggugat baik pasal-pasal yang dikemukakan penggugat maupun tidak dikemukakan dalam *petitumnya*.²¹

Pada proses terjadinya perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, ketika suami telah mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya maka kebanyakan dalam surat permohonan tersebut suami tidak menyebutkan mengenai kewajiban-kewajibannya dalam *petitum*, padahal ada hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang yang menjadi kewajiban suami dan menjadi hak bagi istri yang akan diceraikan oleh suaminya. Adapun kewajiban yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan *mut'ah*, *mut'ah* ini diberikan kepada mantan istri sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan mantan suami dan dapat berupa uang ataupun benda. Sesuai dengan perintah Allah dalam QS. Al-Ahzab/ 33: 28.

²⁰Muhamad Anwar Umar, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

²¹Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 222.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٦٢﴾

Terjemahnya:

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah[1212] dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.”

2. Memberikan nafkah selama mantan istri menjalani masa *iddahnya*
3. Pelunasan mahar, bila mahar istri terhutang baik separuh atau seluruhnya dan istri belum disetubuhi maka wajib bagi suami untuk melunasinya kecuali istri telah merelakannya.
4. Memberikan biaya *hadhanah* bagi anak-anaknya yang belum dewasa, anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun masih menjadi tanggung jawab dari ayahnya.
5. Pelunasan nafkah selama dalam masa perkawinan. Apabila dalam masa perkawinan suami pernah tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya maka itu semuanya di anggap hutang suami dan ketika ia hendak menceraikan istrinya maka ia harus memberika nafkah yang terhutang tersebut.²²

Adapun Formulasi permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon (suami) tersebut berisi sebagai berikut:

1. identitas pemohon (suami) dan termohon istri berupa;
 - a. Nama
 - b. Umur
 - c. Tempat kediaman
2. *Posita* yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya cerai talak oleh suami

²²Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

3. *Petitum*, yang berisi;

a. *Primair*

- 1) Mengabulkan permohonan pemohonan
- 2) Menetapkan, mengizinkan kepada pemohon untuk mengikrarkan talak kepada termohon.
- 3) Menetapkan biaya perkara

b. *Subsida*

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Walaupun dalam surat permohonan suami tidak memuat *petitum* yang menjadi hak seorang istri yang sekaligus menjadi kewajiban suami ketika telah terjadi perceraian maka masih ada peluang bagi termohon (istri) untuk mengajukan gugatan rekonvensi.²³

Gugatan rekonvensi adalah gugatan balik dari pihak termohon terhadap pemohon, namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B masih banyak istri yang tidak mengajukan rekonvensi disebabkan ketidaktahuannya terhadap hak yang dimilikinya, walaupun seorang istri mengajukan gugatan rekonvensi maka istri tersebut mengajukan *petitum* yang pada dasarnya meminta pembagian harta gono gini.²⁴

Dalam hal ini jika istri tidak mengajukan rekonvensi mengenai hak yang dimilikinya maka sangatlah menguntungkan untuk pihak pemohon (suami) karena kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sebagai akibat hukum dari permohonan cerai talak yang ia ajukan tidak dituntut oleh istri.

²³Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

²⁴Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

Berdasarkan pasal 41 huruf c Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya secara *ex officio* tanpa harus ada permintaan dari pihak istri dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki istri untuk terwujudnya perceraian yang adil. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Ada berbagai alasan dan pertimbangan hakim menerapkan *ex officio* yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pelajaran bagi suami agar tidak seenaknya saja menceraikan istri.
2. Untuk memberikan jaminan-jaminan pada istri setelah terjadinya perceraian
3. Memberikan akses keadilan untuk para istri sebagai akibat cerai talak
4. Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki mantan istri sebagai akibat cerai talak.
5. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* atau melaksanakan kewajibannya kepada mantan istrinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberi nafkah sehari-sehari kepada istri.²⁵

Akan tetapi hak *ex officio* tersebut tidak dapat diterapkan hakim dalam rangka melindungi hak istri jika ada beberapa sebab atau halangan diantaranya sebagai berikut:

1. Jika istri dalam keadaan *qabla al-dukhul*
2. Jika termohon dalam keadaan dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz*
3. Karena adanya pernyataan dari pihak istri termohon yang tidak menghendaki diberikannya hak-hak yang dimilikinya.

²⁵Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

4. Suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk dibebani hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istrinya.
5. Istri yang *nusyuz* hanya mendapatkan nafkah *mut'ah* saja.

Nusyuz adalah istri yang membangkang terhadap suaminya. Seorang istri bisa dikatakan nusyuz apabila istri tersebut benar-benar melakukan penghianatan kepada suami., istri melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, istri tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, serta bila seorang istri melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Agama. Ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai, dan suami tersebut tidak mau bercerai seorang istri tidak dapat dikatakan *nusyuz*.²⁶

Bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa baik secara menghukum pemohon untuk membayar *mut'ah* dan *iddah* kepada termohon maupun yang tidak menghukum, secara normatif-yuridis dibenarkan berdasarkan adagium *res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan hakim harus dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya sebagaimana adagium *ius curianovit*. Dalam memutus perkara hakim independen berdasarkan keyakinannya.²⁷

Tujuan hakim menerapkan hak *ex officio* yang dimilikinya dalam memutuskan perkara cerai talak adalah memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat, karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang hak yang dimilikinya terutama hak yang dimiliki oleh seorang istri jika hendak diceraikan oleh suaminya sehingga hakim harus menggunakan hak *ex officio* yang diberikan kepadanya untuk menunjukkan hak-hak yang dimiliki oleh

²⁶Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

²⁷Sutopo, *Istilah dan Adagium Hukum*, (Semarang: YPPHIM Jawa Tengah, 2001), h. 25.

seorang istri sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak.²⁸ jadi terhadap perkara-perkara tertentu hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak, pengecualian terhadap asas *ultra petitum partium* ini sifatnya sangat kasuistik artinya tidak dalam semua kasus yang masuk ke Pengadilan, hakim memutuskan dengan menggunakan hak *ex officio*.

Seorang suami jika ingin bercerai harus mengungkapkan alasan-alasan mengapa ia ingin bercerai dengan istrinya, Apabila alasan-alasan cerai talak yang diajukan pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum dan pihak termohon (istri) juga tidak memiliki halangan untuk menerima hak-haknya.²⁹ Sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 dan 152 KHI maka amar putusannya akan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap termohon
3. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada pemohon:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah (.....)
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah (.....)
4. Menghukum pemohon untuk menyerahkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana amar putusan pada angka 3 (tiga) di atas kepada termohon sesaat sebelum tergugat mengikrarkan talaknya.³⁰

Adanya keharusan bagi pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajiban tersebut secara tunai sesaat setelah ikrar cerai talak di ucapkan dan sebelum

²⁸Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

²⁹Muhamad Anwar Umar, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

³⁰Putusan Nomor 0488/Pdt.G/2015/PA Sgm. h. 37.

melakukan ikrar talak hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B menanyakan kepada pihak suami apakah sudah disiapkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan amar putusan, jika belum maka ikrar talak ditunda sampai suami siap dengan kewajiban-kewajiban tersebut.³¹

Berkaitan dengan kewajiban suami sebagai pemohon untuk membayar nafkah atau *mut'ah* walaupun tanpa ada gugat rekonvensi dari istri, hakim secara *ex officio* tetap dapat membebaskan hal tersebut kepada suami. Hal ini didasarkan pada QS Al-Baqarah/2: 241.

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”³²

Wanita wanita yang dijatuhi talak oleh suaminya setelah digauli, berhak memperoleh harta sesuai keinginan mereka, sebagai penghibur diri. Harta itu diberikan dengan cara yang terbaik dengan melihat kondisi finansial suami sebab yang demikian itu merupakan konsekuensi ketakwaan dan keimanan.³³

(wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat *mut'ah*), maksudnya diberi *mut'ah* (secara patut) artinya menurut kemampuan suami (sebagai suatu kewajiban), *haqqan'* dengan baris diatas sebagai *maf'ul* mutlak bagi *fi'ilnya* yang dapat diperkirakan (bagi orang-orang yang taqwa). Hal ini di ulang kembali oleh

³¹Muhamad Anwar Umar, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), h. 40.

³³Tafsir Quraisy shihab

Allah agar mencapai pula wanita-wanita yang telah dicampuri, karena ayat sebelumnya adalah ayat mengenai yang belum dicampuri.³⁴

Berdasarkan ayat di atas menurut saya Allah memerintahkan kepada hambanya yang hendak menceraikan istrinya maka wajib baginya memberikan sesuatu yang disebut dengan nafkah *mut'ah* sesuai dengan kemampuannya sebagai tanda ia beriman kepada Allah.

D. Akibat Hukum Penerapan Hak *Ex Officio*

Pelaksanaan Tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang pada hukum, Undang Undang dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*sosial justice*). Keadilan yang dimaksud disini adalah bukan keadilan prosedural (*formil*), akan tetapi keadilan substantif (*materil*) yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Memberikan bantuan hukum atau nasehat hukum kepada para pihak adalah perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 143 RBg dan pasal 132 156 RBg. Jo pasal 58 ayat (2) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 4 Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan:

³⁴Tafsir jalalayn

“Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Adapun akibat dari penerapan hak *ex officio* yaitu:

a. Bagi pihak istri

Jika hakim tidak menerapkan hak *ex officio* dalam putusannya di perkara cerai talak sedangkan ada hak-hak dari istri yang harus diberikan dan tidak ada yang menghalanginya untuk itu maka seorang istri akan kecewa. karena ketika termohon hadir di Pengadilan Agama dengan penuh harapan bahwa harapan dan kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-hak nya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku namun yang di dapatkan hanya sekedar akta cerai maka ia akan merasa kepentingannya tidak terpenuhi. Walaupun akta cerai merupakan hal yang urgen sebagai bukti perceraian namun itu baru sebagian dari perwajahan asas kepastian hukum, belum menggambarkan nilai dasar keadilan dan asas manfaat. Beda halnya jika hakim yang memberikan hak-hak yang dimiliki istri dengan menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya maka istri akan merasa mendapatkan keadilan, memeberikan kepastian hukum dengan akta cerai, dan manfaat dari isi putusan hakim.³⁵

Dampak sosiologis pada termohon yang pulang hanya membawa akta cerai maka Pengadilan Agama akan dianggap sebagai lembaga isbat cerai dan juga berpikiran bahwa apapun masalahnya hasilnya akan cerai, sehingga Pengadilan Agama diparodikan layaknya puskesmas, apapun penyakitnya, CTM dan antibiotik obatnya.

Apabila kejadian itu terjadi beberapa kali maka termohon akan enggan ke Pengadilan Agama, untuk apa datang? Bukankah hasilnya sudah jelas Yaitu cerai dan hanya mendapatkan akta cerai. pada titik ini sama dengan yang saya

³⁵Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

bahasakan di atas tadi yaitu tidak tercapai asas manfaat karena asas manfaat dirasakan oleh pihak yang berperkara juga mengandung pembelajaran terhadap masyarakat pada umumnya.

Berbeda dengan putusan hakim yang mengakomodir semua kepentingan para pihak terkait dengan akibat putusnya perceraian karena talak yaitu *mut'ah* dan *iddah* serta nafkah yang terhutang bahkan istri juga mendapatkan putusan yang amarnya menetapkan nafkah anak maka secara sosiologis masyarakat akan menilai Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Disinilah asas keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat tercapai.

b. Bagi pihak suami

Dampaknya bagi suami jika hakim menerapkan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk memberikan hak yang dimiliki istri itu adalah pengetahuan dan pemahaman suami akan bertambah tentang Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, ia baru sadar bahwa ketika ia hendak menceraikan istrinya maka ada hak dari istri yang harus ia berikan, sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan hak-hak dari istri yang hendak diceraikan tetapi ada juga suami yang egois dan enggan memberikan hak istrinya, karena ia beranggapan bahwa ia mengajukan permohonan cerai talak karena kesalahan dari istri sehingga dengan itu pemohon (suami) menganggap bahwa istri tidak perlu atau tidak berhak untuk diberikan hak-haknya, itu semua kembali kepada sifat dan karakter masing-masing orang, yang jelas Pengadilan telah menunjukkan kepada suami hak-hak yang dimiliki istri jika ia enggan melaksanakan putusan hakim maka konsekuensinya pembacaan ikrar talak oleh pihak suami akan ditunda sampai

suami bersedia memberikan apa yang menjadi hak dari istri yang akan diceraikan.³⁶

Peranan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian bukan semata-mata mengadministrasi atau mencatatkan telah terjadinya perceraian antara dua orang yang telah terikat dalam perkawinan ditandai dengan keluarnya surat cerai. Namun jika memang perceraian itu tidak dapat dihindari Pengadilan Agama harus memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak.



³⁶Ahmad Nur, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, 16 September 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengkaji BAB I sampai BAB III dan berpijak pada Rumusan Masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara hierarki kedudukan dasar hukum hak *ex officio* terhadap RBg itu sejajar. Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan RBg termasuk dalam UU/Perpu dalam hierarki perundang-undangan, UU/perpu berada dalam urutan ketiga tertinggi setelah UUD 1945 dan ketetapan MPR. Ketika ada pasal yang bertentangan antara RBg dengan Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka yang berlaku adalah asas, asas yang berlaku dalam pertentangan ini adalah *lex specialis derogate lex generalis* Dimana Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu *lex specialis* dari RBg atau Hukum Acara Perdata yang berlaku secara umum. Jadi pasal 189 (3) Rbg tidak bertentangan dengan dasar hukum hak *ex officio* (pasal 41 huruf c) Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Alasan hakim menerapkan hak *ex officio*:
 - a. Untuk memberikan pelajaran bagi suami agar tidak seenaknya saja menceraikan istri.
 - b. Untuk memberikan jaminan-jaminan pada istri setelah terjadinya perceraian
 - c. Memberikan akses keadilan untuk para istri sebagai akibat cerai talak
 - d. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri karena talak.

- e. Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki mantan istri sebagai akibat cerai talak.
 - f. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* atau melaksanakan kewajibannya kepada mantan istrinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberi nafkah sehari-sehari kepada istri.
3. Akibat penerapan hak *ex officio* bagi suami:
- a. Pengetahuan dan pemahaman suami tentang kewajiban hukum semakin bertambah.
 - b. Ikrar talak ditunda jika suami enggan melaksanakan putusan *ex officio* hakim.
- Akibat penerapan hak *ex officio* bagi istri:
- a. Memberikan keadilan kepada istri atas hak-hak yang dimilikinya
 - b. Menegakkan asas hukum yaitu asas keadilan.

B. Implikasi penelitian

1. Untuk memberikan informasi kepada para istri yang diceraikan oleh suaminya bahwa ada kewajiban suami yang harus dilaksanakan setelah menceraikan istrinya.
2. Untuk para hakim agar selalu menjunjung tinggi keadilan dalam memutuskan perkara yang sedang ditanganinya.
3. Untuk memberikan informasi dan menegaskan kepada para hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas I B bahwa dasar hukum hak *ex officio* tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sehingga para hakim harus bersikap dinamis, tidak boleh statis, dan harus mampu melindungi dan mengayomi pihak-pihak yang berperkara, dengan demikian hakim Pengadilan Agama harus berani

mengenyampingkan substansi hukum yang dinilai buruk dan menghambat pencapaian keadilan sosial masyarakat khususnya dalam perkara perceraian yang didalamnya terdapat hak-hak istri.

4. Untuk peneliti selanjutnya perlu diteliti mengenai penerapan asas *ultra petitum partium* dan memperhatikan kontitusi dan semua peraturan perundang-undangan lainnya tentang perlindungan hak istri.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. II; Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 20016.

Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, 2002.

Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2001.

A. Rasyid Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ash-shidieqhy, Tengku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-qadha*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Christman, John. *Social and Political Philosophy: a Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2002.

Darahim, *Promblematika Peerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Watan Soppeng (Suatu Pendekatan Hukum Islam)*, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2001.

Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005.

Fauzan dan Edy Noerfuady. *Problematika Hak Ex officio Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*. Jakarta: Al hikmah & Ditbinbaperda Islam, 1997.

Ghasaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003.

H. Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasan Bisri, Cik. *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Cet. II Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Hoerudin, Arhum. *Pengadilan Agama Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-sunnah*. Cet. II; Jakarta: Akademika Presindo, 2002.
- Kamil, Ahmad. dan M. fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV darus sunnah, 2015
- Madkur, Muhammad salam. *Peradilan dalam Islam, Alih bahasa Imran AM*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mannan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Formulir Berperkara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Edisi Ketujuh Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari, Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi pertama Jakarta: Kencana, 2004.
- Pramadya Puspa, Yan. *Kamus Hukum* Semarang: Aneka, 1977.
- Putusan Nomor 0488/Pdt.G/2015/PA Sgm.
- R. Soepomo. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: PT Kompas Nusantara, 2009.

- Rasyaid, Nur. *Hukum Acara Perdata*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Rawls, John. *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Gama Press, 2010.
- . *Undang-Undang RI No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Gama Press, 2010.
- . *Undang-Undang RI nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI no.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Gama Press, 2010.
- . *Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- . *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Gama Press, 2010.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso, *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Siirangkir, J.C.T *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. Cet. IV; Jakarta: Pradnya Paramita: 1979.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UIIS PRESS, 2006.
- Sutopo. *Istilah dan Adagium Hukum*, Semarang: YPPHIM Jawa Tengah, 2001.
- Syahrani Riduan. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. V; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. V; Jakarta Universitas Indonesia Press, 1986.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.

Foto dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B



Foto dengan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa KELAS I B



M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Skripsi “Penerapan hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II

Narasumber :

Tanggal :

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu :

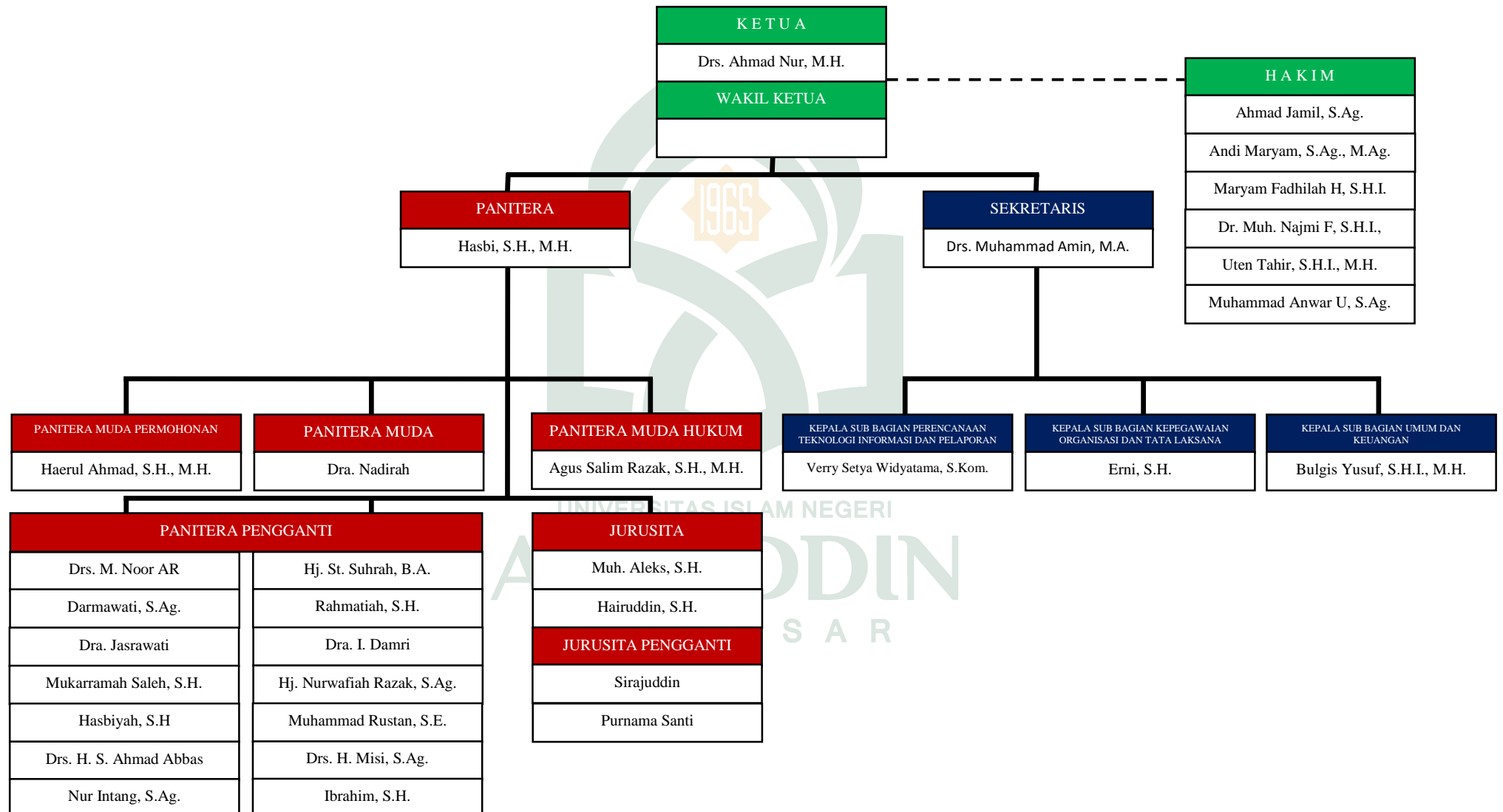
1. Bagaimana kedudukan dasar hukum hakim menerapkan hak *ex officio* Terhadap RBg dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II?
2. Bagaimana alasan hakim melaksanakan hak *ex officio* dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas II?
3. Bagaimana akibat hukum dari penerapan hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II?

Daftar Pertanyaan:

1. Apa dasar hukum bapak/ibu menerapkan *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai talak?
2. Apakah dasar hukum yang bapak/ibu jadikan landasan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku?
3. Apakah bapak/ibu sering menerapkan hak *ex officio* dalam memutuskan perkara cerai talak?

4. Apa alasan bapak/ibu menerapkan hak *ex officio* hakim memutuskan perkara cerai talak?
5. Bagaimana respon para pihak jikalau bapak/ibu menerapkan hak *ex officio* dalam putusan?
6. Keadaan yang seperti apa sehingga bapak/ibu memutuskan untuk menerapkan hak *ex officio*?
7. Apakah tindakan menerapkan hak *ex officio* itu tidak berlebihan?
8. Apakah tindakan menerapkan hak *ex officio* merugikan salah satu pihak yang berperkara?
9. Apakah hak *ex officio* hanya dapat di terapkan di perkara cerai talak saja?
10. Apakah akibat hukum dari penerapan *ex officio* hakim?

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS II**” bernama lengkap Fitri Uthami Syahriani, Nim : 10100113002, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Alm Bapak Alamsyah dan ibu Hj. Nasriah

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar inpres No 23 pekkae kecamatan Tanete Rilau kab. Barru 2002-2007 Sampai Penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Tanete Riaja kab. Barru di tahun 2007-2010, dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Neg. 1 Tanete Rilau Kab. Barru tahun 2010-2013. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama hingga tahun 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R